



► PILKADA JOGJA

Tim Imam-Fadli Tolak Menandatangani Hasil Rekapitulasi

Ujang Hasanudin & David Kurniawan
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Tim pemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono-Achmad Fadli menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di semua kecamatan. Mereka menyebut keberatan saksi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Seluruh kecamatan kami tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Kami semuanya menuliskan di form D2 KWK yang berisi keberatan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu [Bapilu] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai penyokong Imam Priyono-Achmad Fadli, Antonius Fokki Ardianto di sela-sela Mimbar Demokrasi di rumah pemenangan Imam-Fadli, Sabtu (18/2).

Fokki mengatakan keberatan saksi tim Imam-Fadli meminta PPK untuk membuka kembali kotak surat suara tidak sah dan menghitungnya. Awalnya keberatan itu ditindaklanjuti di Kecamatan Kotagede yang menghitung ulang sampai 18 tempat pemungutan suara (TPS), namun saat akan membuka kotak TPS ke-19, saksi pasangan calon (paslon) nomor dua mendadak menolak dan anggota Panwascam juga berganti.

Ia pun heran dan curiga ada kongkalikong di balik keengganan membuka kembali surat suara tidak sah. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Umbulharjo. Saat surat suara tidak sah dibuka secara sampling terbukti ada dua surat suara sah namun dianggap tidak sah.

● Lebih Lengkap Halaman 9



<https://goo.gl/RH0Nsi>

Tim Imam-Fadli...

Fokki menyisir temuan serupa bisa terjadi di TPS lainnya mengingat banyaknya surat suara tidak sah. Ia khawatir banyak surat suara sah, tapi dianggap tidak sah karena ketidakakuratan KPS. Di Kecamatan Danurejan, saksinya juga sempat meminta pembukaan kotak suara dan mendapat persetujuan dari Panwascam. Namun rekomendasi Panwascam itu diabaikan PPK.

Proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan selesai digelar pada Kamis-Jumat lalu. Proses rekapitulasi itu sempat diprotes saksi, namun tetap berjalan hingga selesai. Proses selanjutnya adalah rekapitulasi tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja pada 22-23 Februari nanti.

Fokki mengatakan keberatan semua saksi di tingkat PPK akan ia bawa ke KPU. "Apa yang menjadi keberatan di semua PPK akan kami titikan pada saksi yang akan mengawal rekapitulasi di tingkat KPU nanti," kata dia.

Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan akan mengugat proses penyelenggaraan Pilkada Kota Jogja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini tim pemenangan masih terus mengumpulkan bukti-bukti materiil yang menjadi dasar mengajukan gugatan.

Fokki mengaku upaya yang dilakukannya bukan memperjuangkan kalah menang, melainkan ingin memastikan hak konstitusi semua warga kota terjalin. Ia khawatir warga yang sudah menggunakan hak suaranya dengan benar, namun ternyata diabaikan karena dianggap tidak sah. "Untuk membuktikannya, maka harus membuka surat suara tidak sah," tegas dia.

Dalam acara mimbar bebas di rumah pemenangan Imam-Fadli itu diikuti ratusan simpatisan PDIP. Acara itu diisi kesaksian-kesaksian yang dialami saat memantau proses penghitungan suara di TPS sampai tingkat PPK. Selesai orasi, mereka mendatangi Kantor Panwas Kota Jogja untuk menanyakan perkembangan laporan dugaan oknum ASN Pemerintah Kota Jogja yang tidak netral. Mereka juga menanyakan akan mendatangi Kantor KPU Kota Jogja dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sebelumnya, anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, DPP PDIP, Aris Surya mengaku mendapat banyak laporan terkait indikasi pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan, baik dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah hingga proses distribusi surat undangan yang bermasalah.

Demikian keberatan saksi yang memiliki mandat, kata Aris, seharusnya juga dipertimbangkan saksi yang memiliki mandat punya kewenangan adanya keberatan. "Akibat hukumnya, kalau tidak menindaklanjuti laporan saksi, ancaman pidana menunggu,"

kata dia.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu itikad baik dari PPK dan KPU. Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Yudianto sudah menegaskan tidak masalah untuk membuka kotak suara asalkan dengan bukti yang kuat. "Bukti kuat harus ada karena bukti itu yang menjadi payung hukum kami membuka kotak suara," tegas Wawan.

Imbauan Kapolda

Kepala Kepolisian Daerah DIY Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Dhofri mengklaim pelaksanaan Pilkada serentak di Kulonprogo dan Kota Jogja berjalan aman dan lancar. Dia berharap agar simpatisan calon dapat menahan diri hingga KPU mengumumkan siapa yang terpilih menjadi kepala daerah di dua tempat tersebut.

"Suasana kondusif itu harus tetap terjaga. Jangan sampai ada aksi yang mencoreng pelaksanaan yang sejak awal sudah berlangsung dengan baik tersebut," kata Dhofri kepada wartawan di sela-sela menghadiri kegiatan bakti sosial di Polres Gunungkidul, Sabtu.

Menurut dia, kelancaran Pilkada bukan semata-mata menjadi tugas pihak keamanan. Namun kondisi itu dapat diwujudkan dengan melibatkan peran dari semua pihak, mulai dari calon, partai pengusung hingga simpatisan dari calon yang bertaruh dalam pemilihan untuk saling menahan diri. "Mari bersama-sama kita jaga agar suasana tetap kondusif hingga akhir pilkada nanti," ujar mantan WakpolDA DIY itu.

Dhofri berharap kejadian di Kecamatan Kraton pada Kamis (16/2) lalu tidak terulang kembali. Untuk itu, pihaknya siap melakukan pengamanan sampai adanya keputusan pemenangan pilkada oleh KPU Kota Jogja. Dia pun mengungkapkan, keberhasilan petugas dalam menangani permasalahan di Kraton juga sebagai bentuk kesiapan polisi dalam mengawal pilkada mulai dari awal tahapan pelaksanaan.

Sudah kami siapkan 2.500 personel [pengamanan di Kulonprogo dan Kota Jogja]. Dengan jumlah ini sudah sangat cukup untuk pengamanan hingga proses akhir nanti," katanya.

Dia menegaskan, adanya kejadian di Kecamatan Kraton tak lantas membuat pengamanan di Pilkada Kota Jogja mendapatkan perlakuan khusus. Sebab, upaya pengamanan yang sama juga diberikan oleh polisi di Pilkada Kulonprogo.

"Potensi kerawanan di kedua daerah sama sehingga pengamanan yang dilakukan diberlakukan sama pula," ujarnya. Untuk hasil, Dhofri menyerukan sepenuhnya kepada KPU sebagai penyelenggara pilkada. Sementara itu, tugas dari polisi untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman terlah dan

lancar. "Selain menempatkan personel di pos-pos yang telah ditentukan, kami juga menyiapkan pasukan cadangan yang berada di polta maupun perkes untuk memberikan bantuan sewaktu-waktu dibutuhkan," tutur dia.

Temuan Panwas

Sementara itu Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja masih terus mendalami kasus dugaan ketidaknetralan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Yudianto Dwi Sutono.

Yudianto diduga mengampunaskan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja Nomor Dua di salah satu grup percakapan WhatsApp Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro pada 4 Februari lalu. Pesan yang singkat yang disebarluaskan itu kemudian di-screenshot, lalu dilaporkan ke Panwas Kota.

"Dari hasil kajian kami angkat sebagai temuan Panwas Kota," kata Anggota Panwas Kota Jogja, Divisi Penindakan Pelanggaran Pilkeska Hitanarvika, saat menerima ratusan orang yang menanyakan kasus tersebut di Kantor Panwas Kota, Sabtu.

Pilkeska menyatakan kasus tersebut menjadi temuan Panwas karena pelapor tidak memenuhi syarat formil, yakni bukan warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kota Jogja dan memiliki hak pilih dalam Pilkada. Pelapor diketahui merupakan warga Kulonprogo dan masih mengurus dokumen kepindahan ke kota.

Karena alasan itu juga, menurut Pilkeska, pihaknya bersama Forum Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan, tidak bisa memproses pidananya.

Jika hasil kajian nanti ditemukan ada unsur ketidaknetralan, Panwas akan mengirimkan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Ombudsman RI, Inspektoral Kota Jogja, dan Badan Pengawas Pemilu. "Karena mereka yang berwenang memberikan sanksi," kata dia.

Yudianto sendiri sudah membantah mengampunaskan salah satu pasangan calon kepada pegawai UPT Malioboro. Ia berdalih pesan yang diteruskan itu untuk mengajak pegawai UPT Malioboro agar menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2017.

Ia juga mengklaim tidak hanya mengirimkan pesan berisi tentang pasangan calon nomor dua, namun juga mengirimkan pesan soal pasangan calon nomor satu. Hanya, memang ada jeda waktu lebih dari satu jam. Mantan Kepala UPT Taman Pintar ini mempersilakan untuk mengecek langsung ke pegawai UPT Malioboro.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005